



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2 Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 261/DJU/HM1.1/III/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Capaian Kinerja Layanan Hukum  
Tahun 2024

Jakarta, 4 Maret 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap capaian kinerja layanan hukum tahun 2024, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

**1. Capaian Kinerja pada Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)**

a. Terdapat 21 (dua puluh satu) pengadilan negeri yang **tidak mencapai target**;

NO	PENGADILAN NEGERI	TARGET	REALISASI E-PELAPORAN
1	Pengadilan Negeri Singkil	2	0
2	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	3	2
3	Pengadilan Negeri Stabat	7	2
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	4	3
5	Pengadilan Negeri Palembang	15	7
6	Pengadilan Negeri Kayuagung	2	1
7	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	4	0
8	Pengadilan Negeri Kotabumi	15	12
9	Pengadilan Negeri Kota Agung	4	2
10	Pengadilan Negeri Sidoarjo	50	45
11	Pengadilan Negeri Raba/Bima	12	10
12	Pengadilan Negeri Balikpapan	2	1
13	Pengadilan Negeri Parigi	8	5
14	Pengadilan Negeri Palu	6	1
15	Pengadilan Negeri Toli-Toli	5	4
16	Pengadilan Negeri Ambon	14	9
17	Pengadilan Negeri Masohi	5	2
18	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	3	2
19	Pengadilan Negeri Labuha	2	1
20	Pengadilan Negeri Soasiu	4	3
21	Pengadilan Negeri Sanana	2	0



- b. Terdapat 17 (tujuh belas) pengadilan negeri yang penginputan pada aplikasi SAKTI **telah mencapai target**, namun pada aplikasi pelaporan elektronik **tidak mencapai target**;

NO.	PENGADILAN NEGERI	TARGET	REALISASI SAKTI	REALISASI E-PELAPORAN
1	Pengadilan Negeri Suka Makmue	2	2	1
2	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	8	8	0
3	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	2	2	1
4	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	5	5	4
5	Pengadilan Negeri Biak	2	2	1
6	Pengadilan Negeri Sambas	1	1	0
7	Pengadilan Negeri Baturaja	2	2	1
8	Pengadilan Negeri Limboto	2	2	1
9	Pengadilan Negeri Sukoharjo	5	5	4
10	Pengadilan Negeri Pandeglang	3	3	2
11	Pengadilan Negeri Surakarta	1	1	0
12	Pengadilan Negeri Watampone	4	4	2
13	Pengadilan Negeri Pamekasan	6	6	5
14	Pengadilan Negeri Jayapura	4	4	0
15	Pengadilan Negeri Bekasi	4	4	0
16	Pengadilan Negeri Balige	23	23	3
17	Pengadilan Negeri Bogor	2	2	1

## 2. Capaian Kinerja pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

- a. Terdapat 3 (tiga) pengadilan negeri yang tidak mencapai target;

NO.	PENGADILAN NEGERI	TARGET	REALISASI SAKTI	REALISASI E-PELAPORAN
1	Pengadilan Negeri Lahat	263	190	34
2	Pengadilan Negeri Namlea	236	101	96
3	Pengadilan Negeri Masohi	405	241	60

- b. Terdapat 91 (sembilan puluh satu) pengadilan negeri yang penginputan pada aplikasi SAKTI **telah mencapai target**, namun pada aplikasi pelaporan elektronik **tidak mencapai target**;



NO	PENGADILAN NEGERI	TARGET	REALISASI SAKTI	REALISASI E-PELAPORAN
1	Pengadilan Negeri Denpasar	179	179	59
2	Pengadilan Negeri Oelamasi	80	80	0
3	Pengadilan Negeri Bajawa	103	103	32
4	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	80	80	45
5	Pengadilan Negeri Subang	105	108	103
6	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	46	46	41
7	Pengadilan Negeri Karawang	126	252	53
8	Pengadilan Negeri Mukomuko	34	34	28
9	Pengadilan Negeri Samarinda	140	140	89
10	Pengadilan Negeri Ruteng	103	103	33
11	Pengadilan Negeri Idi	36	36	2
12	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	324	324	172
13	Pengadilan Negeri Ternate	97	97	40
14	Pengadilan Negeri Buntok	118	118	112
15	Pengadilan Negeri Lumajang	103	104	74
16	Pengadilan Negeri Sidoarjo	138	138	113
17	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	101	111	22
18	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	52	56	43
19	Pengadilan Negeri Kab.Malang, Jawa Timur	103	499	55
20	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	253	297	251
21	Pengadilan Negeri Airmadidi	202	249	191
22	Pengadilan Negeri Bangkinang	211	211	192
23	Pengadilan Negeri Jayapura	143	143	112
24	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan	152	152	26
26	Pengadilan Negeri Purwodadi	148	148	90
27	Pengadilan Negeri Balige	59	59	32
28	Pengadilan Negeri Dompu	80	80	34
29	Pengadilan Negeri Pagar Alam	61	61	24
30	Pengadilan Negeri Sinjai	72	72	58
31	Pengadilan Negeri Solok	159	159	134
33	Pengadilan Negeri Medan	632	632	419
34	Pengadilan Negeri Tarutung	52	52	0
35	Pengadilan Negeri Padang	270	270	58
36	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	80	80	41
37	Pengadilan Negeri Tegal	137	137	96
38	Pengadilan Negeri Meulaboh	67	67	22
39	Pengadilan Negeri Singaraja	250	259	220
40	Pengadilan Negeri Pacitan	76	76	60
41	Pengadilan Negeri Bukittinggi	202	202	189
42	Pengadilan Negeri Praya	104	134	34
43	Pengadilan Negeri Purwokerto	93	93	68
44	Pengadilan Negeri Palembang	229	229	31
45	Pengadilan Negeri Kotobaru	25	25	22
46	Pengadilan Negeri Tapaktuan	162	162	154
47	Pengadilan Negeri Lembata	80	80	66
48	Pengadilan Negeri Sungguminasa	223	223	177
49	Pengadilan Negeri Sawahlunto	84	84	74



50	Pengadilan Negeri Curup	61	61	15
51	Pengadilan Negeri Raba/Bima	104	120	67
52	Pengadilan Negeri Indramayu	84	84	44
53	Pengadilan Negeri Labuan Bajo	80	80	27
54	Pengadilan Negeri Rantau	59	59	41
55	Pengadilan Negeri Dumai	51	51	20
56	Pengadilan Negeri Salatiga	160	160	154
57	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	271	271	234
58	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	840	840	490
59	Pengadilan Negeri Saumlaki	405	405	3
60	Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal Di Slawi	27	27	18
61	Pengadilan Negeri Sumenep	80	80	37
62	Pengadilan Negeri Majene	57	57	1
63	Pengadilan Negeri Bangkalan	80	81	68
64	Pengadilan Negeri Gianyar	169	196	142
65	Pengadilan Negeri Parigi	76	76	23
66	Pengadilan Negeri Sragen	211	211	85
67	Pengadilan Negeri Kotabaru	59	64	28
68	Pengadilan Negeri Palu	405	405	45
69	Pengadilan Negeri Selong	135	135	106
70	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	51	51	26
71	Pengadilan Negeri Lubuk Lingau	270	270	58
72	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	30	30	28
73	Pengadilan Negeri Natuna	80	87	30
74	Pengadilan Negeri Jepara	67	67	32
75	Pengadilan Negeri Pekanbaru	169	169	90
76	Pengadilan Negeri Toli-Toli	304	304	251
77	Pengadilan Negeri Tais	67	67	43
78	Pengadilan Negeri Bangli	84	84	70
79	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	202	290	133
80	Pengadilan Negeri Bobong	17	17	10
81	Pengadilan Negeri Demak	96	96	51
82	Pengadilan Negeri Rangkas Bitung	126	126	50
83	Pengadilan Negeri Kotabumi	84	84	55
84	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	137	137	90
85	Pengadilan Negeri Bireuen	117	117	107
86	Pengadilan Negeri Pangkajene	211	211	139
87	Pengadilan Negeri Takalar	76	76	32
88	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	135	135	93
89	Pengadilan Negeri Probolinggo	103	103	57
90	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	236	236	0
91	Pengadilan Negeri Gresik	103	103	69

### 3. Capaian Kinerja pada Sidang di Luar Gedung Pengadilan

- a. Terdapat 13 (tiga belas) pengadilan negeri yang **tidak mencapai target**;

NO	PENGADILAN NEGERI	TARGET	REALISASI
1	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	6	0
2	Pengadilan Negeri Lahat	150	84



3	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	199	5
4	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	15	12
5	Pengadilan Negeri Tahuna	100	87
6	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	50	36
7	Pengadilan Negeri Tobelo	50	19
8	Pengadilan Negeri Parigi	35	14
9	Pengadilan Negeri Sibuhuan	50	29
10	Pengadilan Negeri Natuna	111	31
11	Pengadilan Negeri Una Aha	30	14
12	Pengadilan Negeri Mataram	90	84
13	Pengadilan Negeri Raba/Bima	54	15

- b. Terdapat 46 (empat puluh enam) pengadilan negeri yang penginputan pada aplikasi SAKTI telah mencapai target, namun pada aplikasi pelaporan elektronik tidak mencapai target;

No.	PENGADILAN NEGERI	TARGET	REALISASI SAKTI	REALISASI E-PELAPORAN
1	Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat	90	90	6
2	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	77	77	42
3	Pengadilan Negeri Limboto	3	3	0
4	Pengadilan Negeri Tarutung	100	100	0
5	Pengadilan Negeri Wangi Wangi	8	8	6
6	Pengadilan Negeri Pematang	38	38	7
7	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	59	69	23
8	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	49	49	45
9	Pengadilan Negeri Blitar	5	5	3
10	Pengadilan Negeri Pasarwajo	160	160	45
11	Pengadilan Negeri Stabat	223	223	140
12	Pengadilan Negeri Cikarang	100	100	56
13	Pengadilan Negeri Luwuk	71	71	9
14	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	50	50	5
15	Pengadilan Negeri Ternate	37	37	33
16	Pengadilan Negeri Garut	35	35	18
17	Pengadilan Negeri Sintang	20	20	19
18	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	52	52	46
19	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan	190	190	0
20	Pengadilan Negeri Bontang	12	12	0
21	Pengadilan Negeri Kotamubago	15	15	0



22	Pengadilan Negeri Balige	80	80	55
23	Pengadilan Negeri Buol	6	6	0
24	Pengadilan Negeri Serui	8	8	0
25	Pengadilan Negeri Oelamasi	21	21	20
26	Pengadilan Negeri Purwakarta	130	130	0
27	Pengadilan Negeri Jember	10	10	0
28	Pengadilan Negeri Sanana	23	23	8
29	Pengadilan Negeri Subang	76	76	74
30	Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika	2	2	0
31	Pengadilan Negeri Malili	20	27	17
32	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	6	6	0
33	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	28	28	24
34	Pengadilan Negeri Pangkajene	20	20	13
35	Pengadilan Negeri Makale	6	6	0
36	Pengadilan Negeri Rantau	10	10	7
37	Pengadilan Negeri Salatiga	4	4	0
38	Pengadilan Negeri Saumlaki	12	12	0
39	Pengadilan Negeri Bangil	10	10	3
40	Pengadilan Negeri Soasiu	44	44	30
41	Pengadilan Negeri Selong	15	15	14
42	Pengadilan Negeri Cibadak	150	150	94
43	Pengadilan Negeri Kabanjahe	22	38	0
44	Pengadilan Negeri Kotobaru	45	45	23
45	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	160	160	56
46	Pengadilan Negeri Ciamis	12	18	11

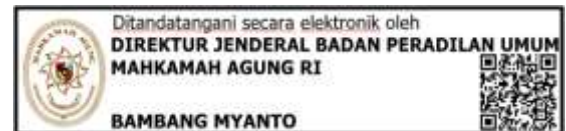
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami minta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri membuat **klarifikasi secara tertulis** mengenai;
  - a. **Penyebab** tidak tercapainya target kinerja layanan hukum tahun 2024 baik Prodeo, Posbakum maupun Sidang di Luar Gedung Pengadilan;
  - b. Alasan pengadilan negeri **tidak melakukan revisi** baik target maupun anggaran, sedangkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah memberi kesempatan kepada setiap pengadilan negeri untuk dapat mengajukan merevisi;
  - c. Alasan terjadinya **perbedaan** penginputan data antara aplikasi Pelaporan Elektronik dengan aplikasi SAKTI;



2. Klarifikasi sebagaimana angka 1 (satu) dikirimkan melalui email [direktoratpapu.badilum@gmail.com](mailto:direktoratpapu.badilum@gmail.com) paling lambat tanggal 11 Maret 2025;
3. Ketua Pengadilan Negeri memastikan Panitera sebagai penanggungjawab data capaian layanan hukum pada Pelaporan Elektronik telah **berkoordinasi** dengan Sekretaris sebagai penanggung jawab data pada aplikasi SAKTI, sehingga data yang dilaporkan pada kedua aplikasi tersebut tidak berbeda satu dengan yang lain.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia

